

MERAYAKAN HPN 2022 DI BULAN PURNAMA Ada Calon Pejabat Tak Hafal Pancasila

BANTUL (KR) - Di dalam dada setiap rakyat dan pemimpin bangsa Indonesia harus bersemayam Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara. Setiap gerakan rakyat, kebijakan serta keputusan para pemimpin bangsa apapun levельnya harus mengandung semangat dan dijiwai sila-sila dalam Pancasilaa berikut implementasinya.

Penegasan tersebut dikemukakan anggota DPR RI Drs HM Idham Samawi saat menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk 'Mantra Proklamasi: Indonesia Bersatu, Negara Maju' pada Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Tembi Rumah Budaya Sewon Bantul, Sabtu (26/2). Turut berorasi pula mantan Wapemred SKH *Kedaulatan Rakyat* Dr Imam Anshori Shaleh berjudul 'Dua Mantra Kata: Media Konvensional dan Digital'.

Idham Samawi menegaskan, Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara yang telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang menghuni ribuan pulau serta terdiri ribuan suku, bahasa, corak budaya dan tradisinya sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 hingga hari ini. "Saya siap berdiskusi dengan siapapun dan pihak manapun yang meragukan Pancasila sebagai satu-satunya falsafah, dasar negara dan bangsa Indonesia yang terbukti mampu mempersatukan segenap anak bangsa dalam bingkai NKRI dari Sabang sampai Merauke. Dari Kepulauan Miangas sampai Pulau



KR-Soeparno S Adhy

Drs HM Idham Samawi

Rote," katanya.

Idham Samawi yang tergabung dalam Komisi III DPR mengungkapkan, setiap kali berlangsung *fit and proper test* terhadap calon anggota berbagai lembaga tinggi negara, dirinya selalu menguji seberapa jauh pengetahuan dan wawasan yang bersangkutan mengenai Pancasilaa berikut cara mengimplementasikan sila-silanya.

Mantan Bupati Bantul selama dua periode itu mengaku sempat kaget ketika salah seorang di antara calon anggota lembaga tinggi negara itu tak hafal urutan sila Pancasila. Calon yang bersangkutan grogi dan *gemrobyos* saat diminta Idham menyebut urutan sila dalam Pancasila.

"Saya sempat tertegun. Wong urutan sila Pancasila saja tidak tahu dan tidak hafal. Bagaimana pula nanti cara mengimplementasikannya saat menjadi pejabat tinggi negara?," tanyanya.

Idham Samawi sempat mengapresiasi DPRD yang bersama Pemda DIY berhasil membuat Perda tentang

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Perda tersebut, menurutnya, merupakan yang pertama kali dan baru satu-satunya yang digagas dan dihasilkan lembaga eksekutif dan legislatif tingkat provinsi di Indonesia.

Dr Imam Anshori Shaleh dalam orasinya memaparkan secara detail tentang media konvensional dan digital berikut kekuatan dan kelemahannya. Dari sisi akurasi, mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) RI itu mengakui media konvensional dalam hal ini media cetak yang terakreditasi, memiliki keunggulan dibandingkan media digital *online*, lebih-lebih media sosial (medsos).

Pada kegiatan bertajuk 'Merayakan HPN 2022 di Bulan Purnama' itu wartawan *KR* Soeparno S Adhy berkesempatan melakukan *soft launching* buku 'Membela Yogyakarta Istimewa' terbitan PT BP Kedaulatan Rakyat. Buku tersebut kemudian diserahkan kepada Drs HM Idham Samawi dan Dr Imam Anshori Shaleh yang telah berke-nan menulis kata pengantar buku. (No)-d

Israk Mikraj Bernilai Inklusif Kemanusiaan

YOGYA (KR) - Israk Mikraj memiliki nilai inklusif bagi kehidupan kemanusiaan dan semesta yang terjabarkan dalam tiga makna. Oleh karena itu, umat muslim termasuk tokoh agama dan organisasi perlu mencontoh akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dengan tutur dan tindakan berkeadaban, baik di dunia nyata maupun di media sosial

"Jangan melakukan tindakan yang membawa *mudharat*, lebih-lebih atas nama agama. Agama harus difungsikan sebagai pencipta kebaikan dalam kehidupan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam refleksi Israk Mikraj Prof Dr Haedar Nashir, Senin (28/2).

Alquran, ujarnya, menyampaikan keagungan Israk Mikraj dalam ayat pertama surat Al-Isra. Dijelaskan pula, tiga makna itu pertama, makna kekuasaan. Israk Mikraj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha hingga Sidratul Muntaha menurut Haedar, mengandung pesan, di atas pencapaian ketinggian ilmu manusia, masih ada kekuatan ilahiyah yang tidak selalu

bisa dirasionalisasi oleh pencerapan dan ilmu pengetahuan manusia.

"Israk Mikraj menunjukkan, di balik kekuasaan manusia yang bersifat profan atau duniawi itu ada kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan yang bersifat ruhaniyah-ilahiyah atau *divine power* atau kekuasaan yang sakral," tuturnya. Maknanya, siapapun baik itu manusia, sekelompok manusia, organisasi, bahkan negara, lebih jauh lagi antarnegara yang memiliki kekuasaan duniawi, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Karena di balik kekuasaan duniawi, ada *divine power*, kekuasaan ilahi, kekuasaan sakral Allah Swt.

Kedua, makna diwajibkannya ibadah salat bagi umat muslim

KEPALA BNPB BAGIKAN MASKER

Turun, Kepatuhan Terhadap Prokes

YOGYA (KR) - Penegakan protokol kesehatan (prokes) menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-19. Karena itu, upaya penegakan prokes terus dilakukan Pemerintah. Bahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turun langsung ke sejumlah daerah termasuk DIY untuk membagikan masker kepada masyarakat, untuk menekan laju penularan Covid-19 yang saat ini melebihi gelombang satu dan dua.

DIY dipilih sebagai teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia, untuk ketertiban pelaksanaan prokes, terutama di tempat-tempat umum. Terlebih DIY menjadi tempat yang diminati wisatawan, sehingga diharapkan pengunggun tetap tertib menerapkan prokes.

"Ketika kasus Delta melandai sampai akhir 2021, terkesan kepatuhan

masyarakat terhadap prokes menurun. Kemudian adanya varian Omicron, Satgas Nasional Penanganan Covid-19 BNPB melakukan edukasi dan sosialisasi agar prokes meningkat, dengan pembagian masker. Kegiatan pembagian masker sudah dilakukan di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kali ini menyasar DIY," kata Kepala BNPB Suharyanto usai membagikan masker di kawasan Malioboro, Yogya, Minggu (27/2).

Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana mengatakan, jumlah kasus Covid-19 di DIY saat ini telah melampaui jumlah kasus pada gelombang kedua atau varian Delta. Dengan tingginya kasus ini menjadi tanda bahwa pandemi belum usai. Perjuangan untuk menangani Covid-19 serta menjaga sesama masih perlu dilanjutkan. Untuk itu perlu kerja

dalam peristiwa Israk Mikraj, menurut Haedar, ibadah salat memiliki dua dimensi pesan yakni hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminalah*) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*habluminannas*).

"Dalam posisi ini, jadikan Israk Mikraj dengan buah dari salat untuk membangun relasi kemanusiaan yang semakin baik, tapi juga relasi ketuhanan yang semakin dekat, sehingga manusia semakin damai dengan langit, tapi juga semakin damai dengan bumi. Artinya bangun kehidupan yang lebih baik, adil, damai, tenteram, aman, makmur serta hidup maju bersama, sehingga kehidupan menjadi penuh makna," urai Haedar.

Makna ketiga, adalah dijalankannya dua risalah Nabi setelah Israk Mikraj, yaitu risalah menyempurnakan akhlak beserta risalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Dua risalah ini, mengandung makna, Islam membangun peradaban sekaligus membangun keadaban.

(Fsy)-d

PERISTIWA SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

Layak Dijadikan Hari Penegakan Kedaulatan Negara



KR-Istimewa

Aris Eko Nugroho SP MSi

PERISTIWA Serangan Umum 1 Maret merupakan bagian penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Serangan yang berlangsung selama enam jam di Yogya berhasil menunjukkan kembali eksistensi Indonesia di dunia internasional. Selain itu, peristiwa tersebut juga mampu menyatukan kembali persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia untuk mengisi dan memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.

Menurut Sejarawan UGM Dr Sri Margana MHum, Serangan Umum 1 Maret tidak sekadar persoalan militer, tapi menyangkut politik pemerintahan yang lebih luas. Bagaimana pemimpin politik yang dibuat terus berjuang dengan diplomasi. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bergerak, tentara bergerilya, rakyat sipil ikut berjuang. Kemudian peran Sultan HB IX yang mencoba berkomunikasi dengan Presiden di pembuangan dan melakukan gerakan-gerakan maksimal, termasuk menjangkau bantuan keuangan untuk perjuangan revolusi, dan sebagainya.

Tapi, lanjut Dr Sri Margana, semua itu tidak tergambar dalam film tentang Serangan Umum 1 Maret, yang hanya fokus pada perangnya saja. Film-film itu tidak menggambarkan Serangan Umum 1 Maret sebagai proses gerakan semesta yang melibatkan semua elemen.

"Sineas pembuat film-film itu membuat kesan seolah-olah Serangan Umum 1 Maret hanya peristiwanya orang Yogya saja, bukan peristiwa nasional. Mereka lupa kalau negara RI kala itu bertahannya di Yogya, karena Ibukota Jakarta diambil alih oleh Belanda, dan sedikit demi sedikit wilayah kekuasaan RI diambil alih oleh Belanda, hingga menyisakan wilayah sekitar Yogya, Jawa Tengah dan Jawa Timur," jelasnya.

Menurut Sri Margana, Serangan Umum 1 Maret bukan hanya peristiwa



KR-Istimewa

Dian Lakshmi Pratiwi SS MA

sejarah lokal, melainkan sejarah nasional karena memiliki implikasi langeng tidaknya negara RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sebab, implikasi terbesar Serangan Umum 1 Maret ini melahirkan perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akhirnya memberi pengakuan terhadap kemerdekaan RI, dan seluruh wilayah yang dulu diduduki Belanda dikembalikan ke NKRI. Karena itu, peristiwa gerakan semesta itu perlu digambarkan dengan lebih komprehensif. "Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 layak dijadikan hari besar nasional dengan nama Hari Penegakan Kedaulatan Negara," ujarnya.

Yang terpenting, lanjut Sri Margana, melalui peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 harga diri bangsa Indonesia terlihat. Kita bisa meyakinkan dunia bahwa NKRI benar-benar ada, bukan sebuah *wishful thinking* (angan-angan), dan NKRI itu bukan impian-nya orang-orang terjajah, melainkan takdir sejarah.

Selama ini Serangan Umum 1 Maret sebagai peristiwa nasional tidak pernah diperingati. Padahal dalam historiografi



KR-Istimewa

Dr Sri Margana MHum

nasional (sejarah Indonesia) sudah dijelaskan secara gamblang bahwa implikasi peristiwa Serangan Umum 1 Maret ini begitu besar bagi kelanjutan negara RI, tapi tidak pernah diperingati sebagai sebuah hari nasional.

Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah salah satu dari sekian banyak peran Yogya, terutama Sultan HB IX kepada negara RI. "Yogya mendapat status istimewa tidak lain karena perannya dalam sejarah nasional begitu penting. Antara lain ketika Ibukota Jakarta diambil alih Belanda, Sultan HB IX menawari agar ibukota pindah ke Yogya. Hal yang tidak mudah untuk menyiapkan banyak kantor pemerintahan, departemen dan menggunakan fasilitas yang banyak," ungkap Sri Margana.

Tidak hanya menyediakan tempat, Sultan HB IX juga membiayai pemerintahan secara umum karena RI yang baru merdeka belum mempunyai kas negara yang cukup. Kemudian setelah Proklamasi, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat bahwa Yogya bagian tidak terpisahkan dari NKRI, dan Yogya terbukti menjadi daerah yang paling konsisten mendukung

tegaknya NKRI, di saat daerah lain sempat mendukung federalisme.

Kini, setelah melewati proses cukup panjang, peristiwa Serangan Umum 1 Maret ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, tanggal 24 Februari 2022. Keputusan Presiden ini selayaknya disambut gembira.

Menanggapi adanya Keppres ini, Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang sudah memberikan kepercayaan dengan Keppres Nomor 2 Tahun 2022. "Tentu saja Pemda DIY harus menindaklanjuti setiap tahunnya untuk memperingati 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Harapannya seluruh masyarakat juga merasa handarbeni, sehingga pada akhirnya 1 Maret menjadi aktivitas yang selalu dirindukan masyarakat di Yogya," jelasnya.

Diharapkan pula, Hari Penegakan Kedaulatan Negara tidak hanya diharagai warga Yogya tapi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Untuk itu perlu diskusi lanjutan, aktivitas apa saja yang perlu dimunculkan setiap tahunnya.

Menurut Aris, usulan 1 Maret menjadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara diawali tahun 2018. Kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada masyarakat di luar DIY. "Kita berharap Hari Penegakan Kedaulatan Negara betul-betul menjadi milik bangsa Indonesia, meskipun berasal dari Yogya," katanya.

Dipilihnya 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, menurut Aris, karena 1 Maret pada waktu itu menggambarkan bahwa Indonesia itu masih ada. Dengan adanya pengakuan dunia internasional kepada Indonesia melalui Yogya, tentu saja ini betul-betul merupakan penggambaran sejarah adanya Indonesia ketika itu.

Senada dikatakan Kepala Dinas

Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi SS MA, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 ini merupakan satu bagian dari keseluruhan rangkaian panjang sejarah yang sebenarnya tidak bisa terpisahkan, baik peristiwa yang mendahului maupun peristiwa sejarah yang mengikutinya atau konsekuensi dari serangan enam jam di Yogya tersebut.

"Peristiwa yang mendahului ini dimulai dengan Proklamasi 1945, proses panjang yang kemudian sampai pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan Umum 1 Maret itu kemudian menjadi pemicu peristiwa berikutnya yang kemudian menguatkan, mengembalikan, menegakkan kembali kedaulatan yang selama proses sebelumnya tidak diakui oleh Belanda," tutur Dian Lakshmi.

Dalam proses berikutnya, Serangan Umum 1 Maret menjadi salah satu pemicu munculnya kembali pengakuan kedaulatan negara RI dengan Konferensi Meja Bundar (KMB), dan pada 27 Desember 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan negara RI ke Indonesia.

Menurut Dian, sebenarnya ada banyak urgensi, relevansi dan makna yang terpenting dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Yang terpenting adalah peringatan ini akan menyadarkan kembali keindonesian kita, menyadarkan kebersamaan kita, menyadarkan, mengingatkan serta menguatkan komitmen, kesepakatan nasional pendahulu kita tentang Pancasila sebagai ideologi negara, tentang UUD 1945 sebagai landasan konstruksi konstitusional, tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang persatuan, tentang Bendera Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita tidak mengingkari bahwa sampai sekarang kita masih cukup mengha-

dapi tantangan terhadap upaya-upaya atau gerakan yang mungkin akan menggoyahkan kesepakatan-kesepakatan tersebut," ungkapnya.

Makna yang terpenting berikutnya adalah bahwa dengan tema Penegakan Kedaulatan Negara, maka kita menjadi ditantang. "Tantangan ke depan, mampukah kita dengan berefeksi pada Hari Penegakan Kedaulatan Negara kita mampu menunjukkan kedaulatan kita di bidang politik, ekonomi, hankam dan bahkan kebudayaan. Inilah tantangan kita bersama, bagaimana kita bisa mengisi, menerjemahkan, dan mengkontekstualisasi serta mengaktualisasi Hari Penegakan Kedaulatan Negara," ujarnya.

Untuk memperingati 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Paniradya Kaistimewan DIY dan Sekber Keistimewaan DIY menggelar acara secara *Live Streaming* di channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan>, Selasa (1/3) pukul 19.00. di nDalem Poenakawan, Jalan KHA Dahlan.

Acara ini akan dibuka penampilan Tari Sang Pratiseno oleh Sanggar Move Art Dance. Kemudian dilanjutkan Dialog Keistimewaan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Dian Lakshmi Pratiwi SS MA (Kepala Dinas Kebudayaan DIY) dan Bahauddin MHum (Sejarawan UGM) dengan moderator Widihashto Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan DIY).

Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara juga dimeriahkan penampilan grup musik rock Feel Good dengan formasi Kris (vokal), Yus (gitar), Piyo (bas), Agus (keyboard) dan Bram (drum). Feel Good membawakan lagu perjuangan yang diaransemen ulang. Acara ini diakhiri pemutaran video dokumenter Serangan Umum 1 Maret. (Ria)-d



KR-Istimewa

Penari Sanggar Move Art Dance.



KR-Istimewa

Grup musik rock Feel Good.